

ANALISIS ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL KOTA PEKANBARU SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI

Rio Sayang Juliandi ¹, Mardiana ², Dahlan Tampubolon ³

¹ Universitas Riau, riosayangjuliandi@gmail.com

² Universitas Riau, mardiana@lecturer.unri.ac.id

³ Universitas Riau, dahlan.tampubolon@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Untuk mempercepat pembangunan dan kualitas Kota Pekanbaru pada periode 2017-2022, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi "Terwujudnya Pekanbaru Smart City yang Madani". Maka perlu adanya analisis terhadap kelayakan huni di Kota Pekanbaru melalui penelitian terhadap aspek Ekonomi dan Sosial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian konsep kota layak huni (Liveable City) di Kota Pekanbaru dilihat dari sudut pandang aspek ekonomi dan aspek sosial. Penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data kuisisioner kepada 60 responden secara proporsional Kecamatan di Kota Pekanbaru. Analisis yang digunakan adalah analisis Gap dan analisis Indeks Ketercapaian. Hasil dari Indeks menunjukkan bahwa nilai ketercapaian di Kota Pekanbaru adalah 60,70. Berdasarkan tafsiran pada hasil Indeks Layak Huni Kota Pekanbaru mendapatkan hasil Baik. Diantara indikator yang terdapat pada aspek ekonomi yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah indikator ketersediaan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari yang mudah dijumpai di Kota Pekanbaru. Adapun indikator pada aspek ekonomi yang memiliki nilai yang paling rendah adalah warga lokal terjamin lapangan kerja. Hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa perusahaan terkhusus di bidang industri dan pertambangan yang menggunakan tenaga kerja dari luar kota Pekanbaru. Sedangkan indikator pada aspek sosial yang mendapatkan skor paling tinggi adalah kemudahan akses publik dan toleransi sosial di masyarakat Kota Pekanbaru. Indikator yang mendapatkan skor paling rendah adalah Ketersediaan Ruang Kreatif. Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sail merupakan Kecamatan dengan Indeks ketercapaian paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan Tampan adalah kecamatan dengan Indeks ketercapaian yang paling rendah. Kecamatan Tampan dengan kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru memiliki Indeks Ketercapaian yang lebih rendah dari kecamatan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin padat suatu wilayah, indikator kepuasan masyarakat terhadap kelayakan huni wilayah tersebut juga semakin tinggi.

Kata Kunci: Kota Layak Huni, Ekonomi, Sosial

ABSTRACT

To accelerate the development and quality of Pekanbaru City in the 2017-2022 period, the Pekanbaru City Government has a vision and mission of "Realizing a Civilian Smart City Pekanbaru". So there is a need for an analysis of livability in Pekanbaru City through research on Economic and Social aspects. This study aims to determine the achievement of the concept of a liveable city in Pekanbaru City from the point of view of the economic and social aspects. This qualitative research was conducted by collecting questionnaire data to 60 respondents proportionally in Pekanbaru City. The analysis used is Gap analysis and Achievement Index analysis. The results of the index show that the achievement value in Pekanbaru City is 60.70. Based on the interpretation of the Livability Index results, Pekanbaru City gets good results. Among the indicators contained in the economic aspect that get the highest

score is the indicator of the availability of goods and services for daily needs which are easily found in Pekanbaru City. The indicator on the economic aspect that has the lowest value is that local residents are guaranteed employment. This is due to the fact that several companies, especially in the industrial and mining sectors, employ workers from outside the city of Pekanbaru. While the indicators on the social aspect that get the highest score are the ease of public access and social tolerance in the people of Pekanbaru City. The indicator that gets the lowest score is Availability of Creative Space. From the data above, it can be seen that Sail District is the District with the highest achievement index compared to other districts. While Tampan is the district with the lowest achievement index. Tampan District with a population density in Pekanbaru City has a lower Achievement Index than other sub-districts, so it can be concluded that the denser an area is, the higher the indicator of community satisfaction with the livability of the area.

Keywords: Liveable City, Economic, Social

PENDAHULUAN

Pada umumnya, kota merupakan suatu wilayah fokus dari keberadaan penduduk serta berbagai aktifitas dan kegiatan masyarakatnya, seperti aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan politik didalam suatu area geografis yang memiliki batas wilayah yang resmi dan memiliki struktur administratif dan pemerintahan. Selanjutnya, perkotaan atau wilayah urban merupakan wilayah yang terstruktur dibangun dengan ketentuan atau sebagai suatu wilayah pemukiman penduduk yang tersentral pada suatu wilayah area dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dengan berbagai kegiatan masyarakat yang membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana untuk menopang kegiatan tersebut, pelayanan yang memberikan dukungan yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah pedesaan yang minim dengan sarana prasarana. Dan dapat dikatakan perkotaan merupakan suatu daerah yang sudah terbangun (Adisasmita, 2014).

Kota merupakan representasi dari pembangunan wilayah secara bertahap dan pertumbuhannya cepat maupun lambat yang umumnya dipengaruhi oleh keadaan wilayah dan sumber daya maupun kegiatan masyarakatnya. Kota yang memiliki

struktur dan tata ruang yang layak akan memberikan dampak pada keunggulan kota tersebut. Sehingga kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kondisi sebuah kota menjadi kota yang layak ataupun tidak (Harun, 2001).

Kota menjadi struktur geografis yang memiliki daya tarik masyarakat sebab menjadi pusat dari aktifitas perekonomian masyarakat. Pusat perekonomian ini didukung oleh pemukiman yang luas dan padat, lengkapnya sarana dan prasarana, majunya infrastruktur, dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi (Adisasmita, 2012). Maka tidak jarang kota menjadi tujuan dari aktifitas ekonomi masyarakat dari desa untuk menjadi lebih baik. Hal inilah yang mendasari adanya fenomena urbanisasi penduduk dan menjadi masalah dalam pembangunan kota-kota di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Fenomena urbanisasi ini mempengaruhi perilaku manusia yang dari hari ke hari berkembang menjadi kegiatan yang lebih kompleks dan tentu menimbulkan dampak bagi kota itu sendiri (M & Bayu, 2015). Perkembangan kota kompleks melibatkan berbagai sektor yang saling berhubungan serta keterkaitan antar ruang dan sektor menjadi sebuah sistem perkotaan dan membuat perkembangan kota menjadi dinamis.

Tekanan penduduk dan lahan yang terbatas yang tidak diiringi dengan pembangunan yang baik menjadikan suatu permasalahan bagi perkotaan hingga berbagai masalah lainnya seperti permukiman, transportasi, penyediaan fasilitas publik, lapangan pekerjaan dan masalah lainnya (Dunn, 2013).

Untuk mengetahui tingkat kenyamanan beberapa kota besar di Indonesia (*Liveable City*), Ikatan Ahli Perencana (IAP) yang merupakan asosiasi profesi perencana kota dan wilayah melakukan penelitian yaitu *Most Liveable City Indeks* yang dilakukan setiap 3 tahun sejak tahun 2009 dengan penelitian yang meliputi 25 kriteria yang telah ditetapkan dan baru dilakukan pada beberapa kota di Indonesia. IAP sendiri adalah satu-satunya organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota yang berfungsi sebagai wadah pembina, komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota. Didirikan pada tahun 1971, beranggotakan lebih dari 3.000 perencana wilayah dan kota dan memiliki 25 cabang kepengurusan provinsi.

Menurut Mutaqqin, D (2010) terdapat 25 kriteria kota layak huni yang dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) yang berpedoman pada variable utama perkotaan berupa fisik kota, kualitas lingkungan, transportasi-aksesibilitas, fasilitas, utilitas, ekonomi dan sosial. Sementara survey MLCI terakhir oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) dilakukan tahun 2017 di 26 kota dan 19 provinsi Indonesia. Dari hasil indeks, dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru menduduki peringkat 22 dan 26 kota yang disurvei dan memiliki nilai indeks sebesar 57,8. Kota dengan nilai indeks tertinggi diduduki Solo dengan nilai 66,9 dan nilai indeks terendah adalah kota Makassar dengan nilai indeks 55,7

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau dan menjadi salah satu sentra ekonomi

terbesar di Pulau Sumatra. Pekanbaru dengan luas area 63.226 Ha (632.26 km²) dan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.149.359 jiwa dengan kepadatan 1.817 jiwa/km² juga merupakan wilayah administratif dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat diantara wilayah administratif kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Riau.

Secara prinsip, jika terdapat peningkatan kegiatan pembangunan, maka akan mempengaruhi peningkatan kegiatan pendidikan disegala bidang masyarakat. Peningkatan kegiatan ini juga akan memberikan pengaruh berikutnya yakni meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tersedianya fasilitas dan utilitas yang mampu membantu aktifitas sosial masyarakat di kota tersebut. Sehingga kebutuhan atas ketersediaan fasilitas sosial merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam kebutuhan sebuah kota yang layak huni. Termasuk di Kota Pekanbaru, membutuhkan fasilitas yang mampu menjadi wadah rekreasi masyarakat, menimbang kota Pekanbaru yang sangat minim dengan wisata alam.

Pekanbaru juga termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi. Pekanbaru dengan wilayah administratifnya yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Siak di bagian utara dan timur serta wilayah Kabupaten Kampar di bagian selatan dan barat serta posisinya yang dekat dengan jalur perdagangan bebas di Selat Malaka sehingga terhubung dengan jalur perdagangan internasional sehingga menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera (Syahyudi, 2016).

Berjalannya waktu, Kota Pekanbaru telah bertransformasi menjadi salah satu kota dengan

penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Hal ini diduga oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Kota Pekanbaru. Kondisi ekonomi yang ideal menjadi daya tarik bagi kaum urban dan imigran untuk menjadikan kota Pekanbaru sebagai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari keberagaman etnis yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari Minangkabau sebagai suku mayoritas, Melayu, Batak, Jawa, China, Bugis, dan sebagainya melengkapi keberagaman di Kota Pekanbaru (Kornita, 2015).

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru mencatat pada tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mencapai 119.111.82 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentase sebesar 31,41 % disusul dengan sektor konstruksi dengan persentase sebesar 30,16%. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 adalah 6,01 persen dimana hal tersebut meningkat sebelumnya sebesar 5,39 persen di tahun 2018 dengan seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketercapaian konsep kota layak huni (*Liveable City*) di Kota Pekanbaru dilihat dari sudut pandang aspek ekonomi dan aspek sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kota

Kata "kota" yang biasa digunakan saat ini pada mulanya berasal dari istilah yang umum digunakan oleh daerah Eropa Kuno. Pada Zaman tersebut, yang dimaksud dengan kota adalah sebuah kerajaan-kerajaan kecil yang letaknya berpisah satu sama lainnya. Saat itu daerah-daerah tersebut disebut dengan istilah "polis". Wujud kota pada saat itu berbentuk benteng yang umum disebut dengan "*Urbis*". Selanjutnya benteng yang mengelilingi kota

berubah istilah menjadi *suburban*. Kemudian istilah inilah yang dikenal dengan "*Urban*" (Subagyo, 2009).

Kota dapat diartikan sebagai sebuah wilayah geografis yang memiliki administratif resmi oleh pemerintah setempat yang memiliki fungsi sebagai pemusatan aktifitas masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, politik, dan keamanan yang terintegrasi (Hasan, 2016). Kota memiliki ciri sebagai masyarakat yang terintegrasi maju dan modern. Selain itu mata pencaharian masyarakat memiliki ciri khas non pertanian. Namun perekonomian lebih didominasi pada sektor jasa dan sektor tersier seperti transportasi, keuangan, perbankan, sektor informal, perdagangan, jasa, dan sebagainya (M & Bayu, 2015).

B. Fungsi Kota

Peranan kota dalam aktifitas masyarakat saat ini telah berubah menjadi lebih besar dan semakin penting, dimana lebih dari 30-40% bahkan hingga 50% dari jumlah penduduk tinggal dikota, maka berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan dan pembangunan tata kota harus dipandang dari peran dan fungsinya semestinya memberikan perhatian dan mampu membina secara menyeluruh. Dalam aktifitas kehidupan masyarakat yang dinamis, dan untuk mewujudkan kota yang nyaman untuk dihuni maka kota-kota besar seharusnya memiliki sekurang-kurangnya empat fungsi utama yaitu sebagai tempat tinggal yang ideal, tempat pekerjaan yang memadai, mempunyai sistem lalu lintas yang baik, dan memiliki cukup objek rekreasi maupun ruang terbuka.

1. Fungsi Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia selain dari kebutuhan pangan (makanan) dan Sandang (pakaian). Fungsi wisma memberikan penjaminan bahwa manusia dapat terlindungi dari

kondisi dingin dan panas, serta terlindungi dari marabahaya. Hal inilah yang diberikan oleh Fungsi Kota yakni memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

2. Fungsi Tempat Pekerjaan

Kota besar memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian masyarakat. Pusat perekonomian ini menjadikan kota sebagai tempat yang ideal dalam mencari pekerjaan. Semakin banyaknya aktifitas perekonomian yang terjadi di perkotaan maka akan semakin banyak juga tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. Fungsi Lalu Lintas

Permukiman yang terpusat di wilayah perkotaan mengakibatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang digunakan untuk melayani kegiatan penduduk. Lalu lintas juga berfungsi untuk mengatur masyarakat di jalan raya. Kondisi kota sebagai wilayah geografis dari masyarakat yang terintegrasi dan modern akan menciptakan sarana dan prasarana yang juga mendukung. Sehingga menjadi kota sebagai wilayah lalu lintas yang baik.

4. Fungsi Rekreasi dan ruang terbuka

Kondisi perkotaan yang pada aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat membuat sebuah kebutuhan bagi masyarakat dari segi rekreasi dan hiburan. Perkotaan akan berlomba-lomba menciptakan rekreasi yang menarik bagi masyarakat kota. Mulai dari bisnis hiburan sampai dengan wisata.

C. *Liveable City* (Kota Layak Huni)

Kota layak huni atau *Liveable City* adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahlweg pada Juniarso (2013) "kotayang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi

seluruh masyarakat". Menurut Evan, konsep *Liveablecity* digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untukrealisasinya. Dalam mewujudkan kota yang layak huni atau *Liveable City* harus mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar ini harus dimiliki oleh kota-kotayang menjadikan kotanya sebagai kota yang layak huni dan nyaman bagimasyarakat kota(Juniarso, 2013).

Menurut Douglass, dalam *Liveable City terdapat* empat pilar, yaitu: pertama, meningkatkan sistem kesempatan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, penyediaan lapangan pekerjaan. Ketiga, lingkungan yang aman dan bersih untuk kesehatan, kesejahteraan dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Keempat, *good governance*(Ikatan Ahli Perencanaan, 2011).

Perumusan *Liveable City* yang terdiri dari 8 variabel dan 35 kriteria sebagai berikut (Ikatan Ahli Perencanaan, 2011):

1. Fisik Kota : Tata ruang kota, arsitektur, Ruang Terbuka Hijau, dan karakter budaya lokal.
2. Kualitas Lingkungan : Kebersihan dan tingkat pencemaran kota.
3. Transportasi dan aksesibilitas : Angkutan umum, kualitas jalan, waktu tempuh ke tempat aktifitas pedestrian
4. Fasilitas : Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, tempat rekreasi dan taman kota.
5. Utilitas : ketersediaan air bersih, persediaan listrik dan sarana komunikasi
6. Ekonomi : Tingkat pendapatan masyarakat, biaya hidup dan ramah investasi.
7. Sosial : ketersediaan ruang publik, ruang kreatif, interaksi sosial masyarakat, tingkat kriminalitas, tingkat kesetaraan warga kota,

partisipasi warga, dukungan terhadap orang tua, penyandang cacat, dan wanita hamil.

8. Birokrasi dan Pemerintahan : Leadership yang kuat, dukungan kebijakan, kepastian hukum, akuntabilitas pemerintah, tingkat penerapan rencana kota, dukungan program pembangunan, dukungan pembiayaan.

D. Aspek Liveable City

1. Ekonomi

Ekonomi adalah aspek yang menjadi tujuan yang paling dominan untuk dicari oleh kaum urban ataupun imigran untuk berpindah ke kota. Aspek-aspek ekonomi tidak hanya terkait dengan lapangan kerja dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Namun ekonomi juga harus tersedia dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan barang-barang pokok, dan fasilitas-fasilitas informal menjadi indikator pada aspek ekonomi yang tidak dapat dikesampingkan (Mahi, 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan ekonomi dalam kelayakan sebuah perkotaan adalah hal-hal yang bersifat menyeluruh pada faktor-faktor ekonomi. Mulai dari produksi sampai dengan konsumsi harus mampu disediakan oleh kota sehingga memiliki kelayakan dari aspek ekonominya.

2. Sosial

Sosial adalah interaksi manusia dengan sesamanya dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Maka jika ilmu pengetahuan alam memberikan fokus pada interaksi alam, sedangkan ilmu pengetahuan sosial memiliki fokus antara interaksi manusia dengan sesamanya. Maka aspek sosial pada kelayakan huni sebuah kota adalah sesuatu yang dapat mendukung terlaksananya proses

sosial di masyarakat menjadi lebih damai dan menyenangkan. Proses sosial memiliki klasifikasi berdasarkan kedekatan antar sesama manusia. Maka aspek sosial akan bersinggungan dengan indikator yang membantu interaksi dengan masyarakat secara umum. Hal inilah yang mendasari adanya kebutuhan keamanan, tingkat kriminalitas, toleransi beragama, dan faktor lainnya. Sebab hal-hal tersebut mampu memberikan dukungan pada kenyamanan kehidupan sosial di masyarakat perkotaan (M & Bayu, 2015).

METODE PENELITIAN

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana penelitimenentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yangsesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penduduk dan bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Pekanbaru.
2. Minimal telah berdomisili sekurang-kurangnya 1-2 tahun terakhir di Kota Pekanbaru. Adapun jumlah Populasi diambil dari data rincian penduduk di Kota Pekanbaru yakni 1.149.359 jiwa.

Dengan menyesuaikan jumlah populasi penduduk Pekanbaru yang besar, maka penelitian ini menggunakan rumus *Lameshow* dengan proporsi: 94% yang berasal

dari jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai sample.

Dari perhitungan di atas yang menggunakan rumus *Lameshow*, maka diperoleh sampel 60 orang responden. Dimana diketahui jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sebanyak 1.149.359 jiwa (BPS 2019). Dengan mengikuti perhitungan diatas hasilnya adalah 57,86. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini digenapkan menjadi 60 orang responden.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini *Proportional Random Sampling*. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah. Adapun hasil dari propotional random sampling adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Porsi Sample Penelitian

No	Kecamatan	Porsi Sample
1	Tampan	14
2	Payung Sekaki	5
3	Bukit Raya	4
4	Marpoyan Damai	7
5	Tenayan Raya	12
6	Lima Puluh	2
7	Sail	1
8	Pekanbaru Kota	1
9	Sukajadi	3
10	Senapelan	2
11	Rumbai	4
12	Rumbai Pesisir	5
	Jumlah	60

Sumber: Data Olahan 2021

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuisisioner terhadap responden menggunakan indikator yang terdapat pada Aspek ekonomi dan sosial pada analisis layak huni di Kota Pekanbaru. Sedangkan analisis data menggunakan Uji Validitas dan Realibilitas, Analisis Gap, dan Indeks Ketercapaian Layak Huni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Gap

Analisis Gap adalah bagian dari penelitian ini untuk melihat selisih atau gap dari masing-masing aspek dan indikatornya. Analisis ini bertujuan melihat kondisi pada masing-masing aspek yang paling dominan dan baik secara kondisi sekarang maupun berdasarkan persepsi responden. Penyusunan analisis Gap dibuat secara rinci terpisah berdasarkan wilayah kecamatan yang di rata-ratakan sehingga tergambar selisih antara kondisi sekarang dan harapan responden.

1. Aspek Ekonomi

a. Tingkat Pendapatan

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru memiliki tingkat pendapatan yang rendah dengan nilai 2,98. Sedangkan Gap yang terjadi pada angka 1,5 yang bermakna tingkat pendapatan di Pekanbaru masih belum sesuai harapan dari masyarakat.

b. Biaya Hidup

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa biaya hidup di Kota Pekanbaru berada pada tingkat yang cukup dengan dibuktikan nilai tanggapan responden adalah 2,98. Gap yang didapatkan adalah 1,5 yang membuktikan bahwa kondisi biaya hidup di Kota Pekanbaru belum sesuai harapan dari masyarakat.

c. Kemudahan Berusaha

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa kemudahan berusaha di Kota Pekanbaru berada pada tingkat yang sedang dengan nilai 2,83. Gap yang bernilai 1,7 menunjukkan bahwa kondisi saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.

d. Warga Lokal terjamin Lapangan Kerja

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa terjaminnya kerja warga lokal berada pada angka yang rendah dengan nilai 2,6. Adapun gap adalah 2,1 yang menunjukkan bahwa terjaminnya lapangan kerja bagi warga

lokal masih jauh dari harapan masyarakat.

e. Ketersediaanya Lapangan kerja

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kota Pekanbaru masih rendah dengan nilai 2,55. Sedangkan harapan masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja berada pada angka 4,7 dan memberikan gap 2,1. Hal ini membuktikan bahwa harapan ketersediaan lapangan kerja di Pekanbaru tinggi

f. Ketersediaan Informasi Lapangan Kerja

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa ketersediaan informasi lapangan kerja di Kota Pekanbaru dalam kondisi sedang dengan nilai 2,98. Job Expo yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru sebagai media penjangkauan tenaga kerja belum dirasa sukses dalam memaksimalkan informasi lapangan kerja di Kota Pekanbaru.

g. Kesesuaian Lapangan Kerja dengan Keahlian

Hasil analisis Gap diketahui bahwa Kota Pekanbaru memiliki ketersediaan lapangan kerja yang belum memiliki kesesuaian bagi keahlian para pencari kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai 2,65. Wilayah kota Pekanbaru yang dikelilingi Kabupaten dan Kota industri memungkinkan permintaan keahlian di bidang industri yang belum sesuai dengan lembaga pelatihan kerja atau lembaga pendidikan di bidang tersebut.

h. Kesesuaian Pekerjaan Dengan Pendidikan

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa di Kota Pekanbaru belum memiliki kesesuaian lapangan kerja dengan pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai 2,86. Kondisi lapangan kerja yang didominasi oleh industri tidak berbanding lurus dengan lembaga pendidikan di bidang tersebut.

i. Biaya Kebutuhan Pokok

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa nilai biaya kebutuhan pokok di Kota Pekanbaru belum cukup baik dengan nilai 2,86. Hal ini disebabkan kebutuhan pokok di Pekanbaru didapatkan dari wilayah luar kota Pekanbaru seperti Beras dari Sumatera Barat, Cabe dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari luar kota Pekanbaru. Kondisi ini menyebabkan harga barang pokok tersebut tinggi dibandingkan daerah penghasilnya.

j. Ketersediaan Usaha Sektor Informal

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa nilai ketersediaan usaha informal di Kota Pekanbaru berada pada kondisi yang cukup baik dengan nilai 3,18. Walaupun belum cukup tinggi, namun adanya sektor usaha dibidang Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan kemajuan yang cukup besar di Kota Pekanbaru.

k. Kemudahan Memperoleh Barang dan Jasa Kebutuhan sehari-hari

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru memiliki kondisi ketersediaan barang dan jasa yang cukup lengkap. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan 3,53.

l. Biaya Kesehatan

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa biaya kesehatan di Kota Pekanbaru sudah berada pada kondisi yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan nilai saat ini 3,27.

m. Biaya Transportasi

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa biaya transportasi di Kota Pekanbaru belum terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan nilai 3,05 dengan posisi rendah. Selain itu harapan masyarakat terhadap transportasi ini berada pada angka 4,8 dengan harapan tertinggi terdapat pada Kecamatan Tampan.

n. Biaya Pendidikan

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa biaya pendidikan di Kota Pekanbaru mendapatkan tanggapan kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan

nilai 3,08. Hal ini membuktikan bahwa biaya pendidikan di Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan masyarakat.

o. Tingkat Upah Minimum Kota Pekanbaru

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru memiliki tingkat Upah Minimum yang belum sesuai harapan dari masyarakat. Bahkan Gap yang terjadi melebihi 50% dari harapan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat UMK Kota Pekanbaru di angka 2,8 juta belum sesuai dengan harapan masyarakat sebab masih dibawah biaya kebutuhan yang ada.

p. Tingkat Kenyamanan dan Layak Huni Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai kenyamanan kota Pekanbaru sudah cukup baik dengan nilai 3,45. Hal ini didukung oleh beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru yang memberikan tanggapan rata-rata baik yakni pada Kecamatan Sail, Pekanbaru Kota, Lima Puluh dan Bukit Raya.

2. Aspek Sosial

a. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa menurut responden, Kota Pekanbaru telah menyediakan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan nilai 3,0. Adapun gap dari indikator ini adalah 1,6 dengan Gap paling tinggi berada pada Kecamatan Sukajadi.

b. Kondisi Ruang Terbuka Hijau

Dari data di atas dapat diketahui bahwa menurut responden Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru sudah cukup baik dibuktikan dengan nilai tanggapan 3,00. Sedangkan Gap dari indikator ini adalah 1,7. Hal ini membuktikan bahwa harapan masyarakat terkait RTH cukup tinggi disebabkan Kota Pekanbaru tidak memiliki wisata.

c. Ketersediaan Ruang Publik

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa masyarakat kota Pekanbaru memberikan tanggapan ketersediaan

ruang publik di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan nilai 3,0. Adapun gap dari indikator ini cukup tinggi yakni 1,6. Hal ini disebabkan di Kota Pekanbaru terdapat ruang publik namun belum banyak dan masih terfokus di pusat kota.

d. Ketersediaan ruang Kreatif

Dari tanggapan responden dapat diketahui bahwa ketersediaan ruang kreatif di Kota Pekanbaru masih rendah dengan nilai hanya 2,6. Gap antara kondisi saat ini dan harapan cukup jauh dengan nilai 1,8. Hal ini membuktikan dari segi ruang kreatif belum memberikan kepuasan kepada masyarakat kota Pekanbaru.

e. Ketersediaan Ruang Ibadah

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa menurut responden ketersediaan ruang ibadah di Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun adanya gap pada indikator ini diduga disebabkan tersedianya rumah ibadah diluar dari agama islam yang jumlahnya masih terbatas dan lokasinya jauh dari pusat kota dan umumnya berada di pelosok yang sulit diakses masyarakat.

f. Kemudahan Akses Publik

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa kemudahan akses publik berada pada kondisi yang cukup baik dengan nilai 3,3. gap antara kondisi saat ini dan harapan 0,98 yang membuktikan bahwa akses publik yang ada saat ini belum mencapai harapan masyarakat.

g. Fasilitas Umum tersedia

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa menurut masyarakat kota Pekanbaru, ketersediaan fasilitas umum sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai 3,3. Sedangkan harapan terkait fasilitas umum ini adalah 4,7 dengan wilayah Tenayan Raya dengan harapan yang paling tinggi. Adapun gap dari indikator ini adalah 1,5.

h. Fasilitas umum Merata

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa ketersediaan fasilitas umum di

Kota Pekanbaru sudah cukup baik dengan nilai 3,1. Adapun gap antara kondisi saat ini dan harapan berada pada angka 1,5. Harapan masyarakat kota Pekanbaru terhadap fasilitas umum adalah 4,6. Harapan ini terlihat lebih diberatkan kepada pemerataan yang saat ini belum terwujud dari kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru.

i. Pelayanan Publik

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa tanggapan responden menyatakan bahwa pelayanan publik di Kota Pekanbaru sudah cukup baik dengan nilai 3,2. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang ditunjukkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup baik.

j. Toleransi Sosial

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Pekanbaru telah memberikan tanggapan toleransi sosial yang cukup baik. Adapun nilai toleransi sosial di Kota Pekanbaru adalah 3,3, sedangkan harapan yang ingin dicapai adalah 4,6 dengan gapnya 1,3.

k. Ketegasan Penegakan Hukum

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Pekanbaru menyatakan ketegasan penegakan hukum di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun nilai yang didapatkan adalah 2,9 dengan harapan 4,5 dan gap 1,6.

l. Masyarakat Taat Hukum

Hasil analisis Gap diketahui bahwa masyarakat kota Pekanbaru belum sepenuhnya taat hukum dengan nilai tanggapan 2,9. Maka harapan masyarakat di lingkungan tersebut tinggi untuk mengimbangi kondisi yang ada saat ini.

m. Tingkat Kriminalitas

Hasil analisis Gap diketahui bahwa tingkat kriminalitas di Kota Pekanbaru harus diperhatikan. Hal ini disebabkan tanggapan responden dengan nilai 2,8.

n. Tingkat Keamanan

Adapun tingkat keamanan di Kota Pekanbaru telah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai 3,0. Hal ini

membuktikan bahwa sebuah keamanan menjadi faktor penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

o. Ciri dan Karakter Budaya Lokal

Hasil analisis Gap diketahui bahwa dari indikator ciri dan karakter budaya lokal dapat di Kota Pekanbaru cukup baik dengan nilai 3,2. Adapun nilai harapan adalah 4,5. Sedangkan gap dari indikator ini adalah 1,3 yang membuktikan bahwa Kota Pekanbaru telah memiliki ciri dan karakter budaya lokal sesuai harapan masyarakat.

p. Kesetaraan Warga

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru memiliki kesetaraan masyarakat yang cukup baik. Penjaminan hak serta tidak ada diskriminasi dapat diwujudkan di Kota Pekanbaru. Adapun gap antara kondisi saat ini dan harapan hanya memiliki selisih 1,5.

q. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam aktifitas pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai 3,1 dengan harapan 4,6 dan gap 1,5.

r. Interaksi Sosial

Hasil analisis Gap dapat diketahui bahwa interaksi sosial masyarakat kota Pekanbaru sudah cukup baik dengan nilai 3,3. Hasil ini menunjukkan bahwa interaksi sosial masih harus diperhatikan didalam masyarakat dengan kegiatan dan aktifitas sosial masyarakat.

s. Dukungan Terhadap Tua, Cacat, Disabilitas, Wanita Hamil, dan Anak-anak

Hasil analisis Gap diketahui bahwa kota Pekanbaru sudah melakukan dukungan kepada Orang tua, cacat, disabilitas, wanita hamil, dan anak-anak dengan nilai 3,0. Namun jumlah ini masih jauh dari angka harapan yang berjumlah 4,7. Sehingga terdapat gap dengan nilai 1,7.

B. Indeks Ketercapaian

Pembobotan diberikan berdasarkan banyaknya hasil indikator pada masing-masing aspek. Pada aspek Ekonomi mendapat bobot 50 yang dibagikan dengan indikator-indikatornya yang berjumlah 16 menjadi 3,125 per indikator.

Sedangkan aspek Sosial mendapat bobot 50 yang dibagikan dengan indikatornya yang berjumlah 19 menjadi 2,64 per indikator. Maka dapat digambarkan bobot indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indeks Ketercapaian Kota Pekanbaru

Aspek	Indikator	Skor	Bobot	Indeks Ketercapaian
Ekonomi	Tingkat Pendapatan	3	3,125	1,9
	Biaya Hidup	3	3,125	1,9
	Kemudahan Berusaha	2,8	3,125	1,8
	Warga Lokal terjamin lapangan kerja	2,6	3,125	1,6
	Ketersediaan lapangan kerja	2,6	3,125	1,6
	Ketersediaan informasi lapangan kerja	3	3,125	1,9
	Kesesuaian lapangan kerja dengan keahlian	2,7	3,125	1,7
	Kesesuaian lapangan kerja dengan pendidikan	2,9	3,125	1,8
	Biaya kebutuhan pokok	3,1	3,125	1,9
	Ketersediaan usaha informal	3,2	3,125	2
	Kemudahan memperoleh bahan untuk kebutuhan sehari-hari	3,5	3,125	2,2
		Biaya kesehatan	3,3	3,125
Biaya transportasi		3,1	3,125	1,9
Biaya pendidikan		3,1	3,125	1,9
UMK kota Pekanbaru		2,8	3,125	1,8
Tingkat kenyamanan dan layak huni		3,3	3,125	2
Total Aspek Ekonomi				29,79
Sosial	Ketersediaan RTH	3	2,64	1,58
	Kondisi RTH	3	2,64	1,58
	Ketersediaan ruang public	3	2,64	1,58
	Ketersediaan ruang kreatif	2,6	2,64	1,37
	Ketersediaan rumah ibadah	3,6	2,64	1,9
	Kemudahan akses public	3,3	2,64	1,74
	Fasilitas umum tersedia	3,2	2,64	1,69
	Fasilitas umum merata	3,1	2,64	1,64
	Pelayanan public	3,2	2,64	1,69
	Toleransi social	3,3	2,64	1,74
	Ketegasan penegakan hukum	2,9	2,64	1,53
	Masyarakat taat hukum	2,9	2,64	1,53
	Tingkat kriminalitas	2,8	2,64	1,48
	Tingkat keamanan	3	2,64	1,58
	Ciri dan karakter budaya lokal	3,2	2,64	1,69
	Kesetaraan warga	3,1	2,64	1,64
	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3,1	2,64	1,64
	Interaksi sosial	3,3	2,64	1,74
Dukungan terhadap orang tua, cacat, wanita hamil dan anak-anak	3	2,64	1,58	
	Total Aspek Sosial			30,9
Indek Ketercapaian Kota Pekanbaru				60,70

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai ketercapaian di Kota Pekanbaru adalah 60,70.

1. Aspek Ekonomi di Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan kota yang dikelilingi oleh potensi industri di Kabupaten dan Kota disekitarnya. Mulai dari industri Kelapa sawit, Minyak Bumi, Rotan, Karet, Kertas, dan lain sebagainya. Menjadikan Kota Pekanbaru menjadi pusat dari aktifitas industri tersebut. Maka dari itu perekonomian di Kota Pekanbaru dapat dikatakan mencapai pertumbuhan yang cukup baik. Kondisi ini jelas menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota yang memiliki daya tarik bagi pihak investor maupun para pencari kerja.

Hasil dari analisis Indeks Ketercapaian pada Aspek Ekonomi mendapatkan nilai 29,79 dari total keseluruhan bobot 50. Diantara indikator yang terdapat pada aspek ekonomi yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah indikator. Kemudahan memperoleh bahan untuk kebutuhan sehari-hari Kota Pekanbaru yang berada berbatasan dengan Sumatera Barat sebagai penghasil bahan pokok dan Sumatera Utara dengan penghasil buah-buahan, serta Negeri Malaysia dan Singapura memberikan ketersediaan barang dan jasa di Kota Pekanbaru ini menjadi lengkap. Adapun indikator pada aspek ekonomi yang memiliki nilai yang paling rendah adalah ketersediaan lapangan kerja bagi warga lokal. Hal ini disebabkan di beberapa sektor industri ditemukan para pekerja yang digunakan adalah warga yang di luar kota Pekanbaru bahkan masih dijumpai warga negara asing.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purba (2018) dengan judul penelitian "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Layak Huni Di Sumatera Utara" dengan metode deskriptif

kuantitatif. Dalam penelitian ini mengkaitkan variabel-variabel dalam konsep *Liveable City* seperti aspek ekonomi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), aspek kesehatan, transportasi dan lingkungan kota. Hasil dari penelitian dengan menggunakan analisis linear berganda adalah bahwa aspek ekonomi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan transportasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kota Tebing Tinggi sebagai kota layak huni di Sumatera Utara. Artinya dari Kota Tebing Tinggi belum dapat dikatakan kota yang layak huni dari sisi ekonomi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan transportasi yang memadai dan belum memenuhi kriteria kota layak huni. Sedangkan dari aspek kesehatan dan lingkungan perkotaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kota Tebing Tinggi sebagai kota layak huni di Sumatera Utara artinya kesehatan dan kondisi lingkungan Kota Tebing Tinggi sudah memadai dan memenuhi kriteria kota yang layak huni.

2. Aspek Sosial di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru yang memiliki latarbelakang masyarakat yang majemuk menjadikan kota ini sebagai kota yang membutuhkan interaksi sosial. Bukan hanya pada aktifitas di masyarakat, namun pada kebutuhan keamanan dan fasilitas umum menjadi penting di Kota ini.

Hasil dari Indeks Ketercapaian menunjukan bahwa nilai pada Aspek Sosial adalah 30,9 dari total bobot 50. Adapun indikator pada aspek sosial yang mendapatkan skor paling tinggi adalah Kemudahan Akses publik dan Toleransi Sosial. Kantor Walikota yang berada di pusat Kota Pekanbaru sangat mudah dan ramah dalam menerima kunjungan dari masyarakat. Selain itu, kondisi pluralisme dari budaya warga di Kota Pekanbaru menciptakan toleransi sosial yang baik. Sehingga tidak ditemukan gesekan sosial antar etnis ini. Semua hidup berdampingan dengan baik. Sedangkan indikator yang

mendapatkan skor paling rendah adalah Ketersediaan Ruang Kreatif. Ruang kreatif di Pekanbaru terdapat di 2 lokasi yakni di Taman Budaya dan Anjungan Idrus Tintin. Dari segi ketersediaan ruang kreatif sudah tersedia, namun belum termaksimalkan secara semestinya. Hal ini yang membuat beberapa masyarakat kurang mengetahui dari fungsi kedua bangunan tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Heryanto (2017) yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kota Medan Sebagai Kota Layak Huni" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Medan merupakan kota yang kurang layak huni dengan nilai rata-rata 2,661. Hal ini sesuai dengan kondisi Kota Medan yang semakin berkembang dan membutuhkan peningkatan di setiap variabel perkotaannya. Banyak hal yang harus lebih di tingkatkan oleh pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan sebuah kota dengan lingkungan dan atmosfer yang nyaman untuk ditinggali dan bekerja yang dilihat dari berbagai aspek, baik itu fisik maupun non fisik, prinsipnya adalah ketersediaan kebutuhan dasar, fasilitas publik, ruang terbuka untuk interaksi sosial, keamanan, dukungan fungsi ekonomi sosial, dan sanitasi. Hasil nilai persepsi, variabel/faktor yang sudah baik adalah komunikasi, ciri dan karakter budaya local Sementara variabel/faktor yang perlu diperbaiki agar Kota Medan menjadi kota yang layak huni adalah kriminalitas, angkutan umum dan tingkat pencemaran lingkungan kota. Dengan hasil yang demikian ada harapan besar terhadap Pemerintah Kota Medan membuat terobosan baik dari pembangunan maupun kebijakan agar tingkat kriminalitas di Kota Medan menurun disisi lain adanya

pembangunan dan perbaikan sarana angkutan umum, dan di sisi lain membuat peraturan dan kebijakan tegas untuk mencegah setiap tindakan yang dapat menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi.

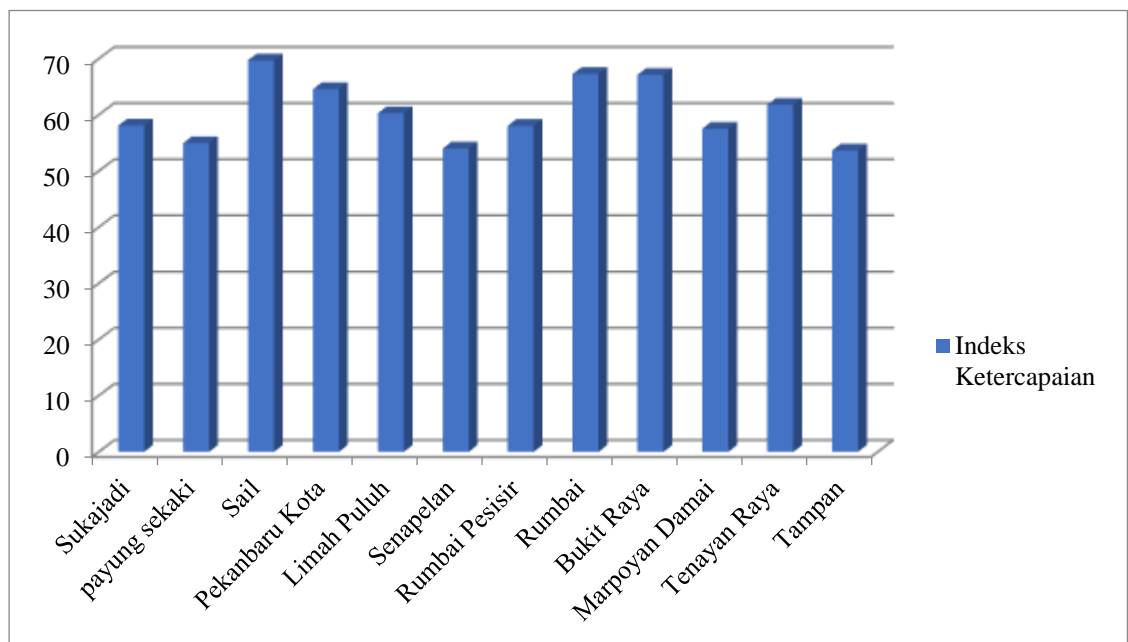
C. Indeks Ketercapaian Per Kecamatan

Adapun indeks ketercapaian perkecamatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh skor pada masing-masing kecamatan selanjutnya dibandingkan dengan 175 (jumlah skor tertinggi). Adapun hasil indeks tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indeks Ketercapaian Per Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Total Skor	Indeks
1	Sukajadi	102	58,09
2	Payung Sekaki	96,2	54,97
3	Sail	122	69,71
4	Pekanbaru Kota	113	64,57
5	Limah Puluh	106	60,28
6	Senapelan	94,5	54
7	Rumbai Pesisir	102	58,05
8	Rumbai	118	67,28
9	Bukit Raya	118	67,14
10	Marpoyan Damai	101	57,55
11	Tenayan Raya	108	61,81
12	Tampan	93,9	53,67
	Kota Pekanbaru	103	60,70

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sail merupakan Kecamatan dengan Indeks ketercapaian paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan Tampan adalah kecamatan dengan Indeks ketercapaian yang paling rendah. Hasil ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 1
Grafik Indeks Ketercapaian Per Kecamatan

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah, Hasil dari Indeks menunjukkan bahwa nilai ketercapaian di Kota Pekanbaru adalah 60,70. Berdasarkan tafsiran pada hasil Indeks Layak Huni Kota Pekanbaru mendapatkan hasil Baik. Diantara indikator yang terdapat pada aspek ekonomi yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah indikator ketersediaan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari yang mudah dijumpai di Kota Pekanbaru. Adapun indikator pada aspek ekonomi yang memiliki nilai yang paling rendah adalah warga lokal terjamin lapangan kerja. Hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa perusahaan terkhusus di bidang industri dan pertambangan yang menggunakan tenaga kerja dari luar kota Pekanbaru. Sedangkan indikator pada aspek sosial yang mendapatkan skor paling tinggi adalah kemudahan akses publik dan toleransi sosial di masyarakat Kota Pekanbaru. Indikator yang mendapatkan skor paling rendah adalah Ketersediaan Ruang Kreatif. Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sail

merupakan Kecamatan dengan Indeks ketercapaian paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan Tampan adalah kecamatan dengan Indeks ketercapaian yang paling rendah. Kecamatan Tampan dengan kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru memiliki Indeks Ketercapaian yang lebih rendah dari kecamatan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin padat suatu wilayah, indikator kepuasan masyarakat terhadap kelayakan huni wilayah tersebut juga semakin tinggi.

SARAN

Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah memperhatikan terjaminnya lapangan kerja bagi warga lokal sebab dari seluruh indikator pada Aspek Ekonomi, indikator tersebutlah yang paling rendah. Selain itu juga pemerintah harus memperhatikan ketersediaan ruang kreatif di Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan aspek sosial sebagai Kota Pekanbaru layak huni.

2. Agar pemerintah memperhatikan kebijakan-kebijakan yang terdapat pada Aspek Ekonomi dan Sosial untuk meningkatkan Indeks Ketercapaian Kota Pekanbaru sebagai kota layak huni.
3. Agar peneliti selanjutnya menggunakan aspek lainnya untuk mengukur kota Pekanbaru sebagai kota layak huni

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2012). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2014). *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*. Makasar: Graha Ilmu.
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, U. R. (2001). Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dalam Otonomi Daerah. *Mimbar, XVII*(22), 172-188.
- Hasan, B. S. (2016). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ikatan Ahli Perencanaan. (2011). *Indonesia Most Livable City Index tahun 2011*. Jakarta: Ikatan Ahli Perencana.
- Juniarso, R. (2013). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Kornita, S. E. (2015). Analisis Ekonomi Basis dan Potensi Sinergi Pembangunan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. *Jurnal Convergence, 5*(1), 1-18.
- M, P. A., & Bayu, W. (2015). *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*. Yogyakarta: Andi.
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan wilayah teori dan aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, N. (2009). *Teori Keruangan. Materi Kuliah*. Yogyakarta : Megister Perencanaan Kota dan Daerah UGM.
- Syahyudi, E. (2016). Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pemerintahan FISIP Universitas Riau*, 53(9), 1689-1699.